

## **BAB II**

### **LAUT CHINA SELATAN**

Laut China Selatan adalah laut semi tertutup yang merupakan laut tepi dari samudra pasifik. Dengan luas 3,5 juta kilometer persegi, kawasan ini membentang dari selat karimata dan selat malaka hingga ke selat Taiwan. Secara geografis Laut China Selatan dibatasi dengan Tiongkok di sebelah utara, Vietnam di sebelah barat, Filipina di sebelah timur, semenanjung Malaya dan Sumatera hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan di sebelah selatan.

#### **A. Potensi Laut China Selatan**

Laut China Selatan merupakan wilayah yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini karena pertumbuhan dan fluktuasi ekonominya mempengaruhi perekonomian dunia. Da juga karena laut ini merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat Laut Tiongkok Selatan dan kepulauan yang ada di dalamnya strategis. *Pertama*, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya. Dengan demikian, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusifnya pun akan semakin luas, terutama untuk negara-negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982. Penguasaan wilayah ini akan memberikan keuntungan geostrategis bagi negara, karena menjadi akses yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik di sebelah timur.

*Kedua*, wilayah ini merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai maritime superhighway karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hampir sepertiga kapal di dunia melintasi kawasan ini. Jumlah

kapal tanker yang melewati Laut China Selatan tiga kali lebih banyak dibanding Terusan Suez, dan lima kali lipat dibanding Terusan Panama. Diperkirakan 50 persen perdagangan dunia melintas perairan ini. Selain itu, pasokan impor minyak bumi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika juga sebagian besar melewati perairan ini. Selain minyak bumi, jalur ini juga banyak dilalui kapal yang mengangkut gas alam cair (LNG), batu bara, dan bijih besi. Berbagai komoditas tersebut sangat vital sebagai penggerak industri negara-negara Asia Timur. Laut China Selatan juga memiliki wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan atau Sea Line of Trade (SLOT) dan jalur komunikasi Internasional atau Sea Line of Communication (SLOC).

*Ketiga*, Kawasan Laut China Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar terutama minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Diperkirakan cadangan minyak dan gas tersebut merupakan yang terbesar keempat di dunia. Untuk keseluruhan Laut Tiongkok Selatan, salah satu kalkulasi menyebutkan bahwa cadangan minyaknya mencapai 213 miliar barel, sementara untuk Kepulauan Paracel dan Spratly sekitar 105 miliar barel. Selain minyak bumi, kawasan ini juga diperkirakan mengandung sumberdaya hidrokarbon yang melimpah. Survei Geologi Amerika Serikat (*United States Geological Survey*) menaksir bahwa 60-70% hidrokarbon tersebut berupa gas alam. Laut China Selatan juga merupakan daerah yang sangat penting bagi ekosistem, badan air ini memiliki sepertiga keragaman hayati laut dunia.

Dengan potensi yang sangat besar tersebut, maka tidak diherankan jika Klaim atas kepemilikan Laut China Selatan inilah yang menimbulkan konflik antar negara terjadi. Bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, tentu sangat penting bagi mereka untuk menjadikan sebagian kawasan di Laut China Selatan

sebagai wilayah teritorial negaranya. Maka dari itu, muncul upaya konfrontatif dari negara-negara yang mempersengketakan wilayah perairan ini, agar dapat menguasai jalur perdagangan ekonomi yang akan membuat daya tawar dari negaranya meningkat. Hal ini disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh negara-negara tersebut. Karena untuk mencapai kelangsungan hidup, suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasional. Dengan pencapaian yang didapatkan melalui kepentingan nasional negara tersebut maka kehidupan negara secara otomatis akan berlangsung stabil, baik dari segi politik, dari segi ekonomi hingga dari segi sosial dan pertahanan keamanan yang dimiliki oleh negara itu juga membaik. Kepentingan Nasional (Nasional Interest) merupakan salah satu faktor pendukung pembuat kebijakan politik luar negeri suatu Negara.

## **B. Claimants State Dan Kepentinganya**

### **1. China**

China mengeluarkan sebuah peta yang merinci klaim kedaulatan negaranya pada tahun 1947. Dalam peta tersebut, China memasukkan kepulauan Paracel dan Spratly masuk kedalam wilayah negaranya. Pada tahun 1948, untuk mempertegas klaimnya terhadap kawasan itu, pemerintah China menarik sebelas garis putus-putus berbentuk huruf *U* yang dan menyebutkan bahwa semua wilayah yang ada di dalam garis tersebut adalah wilayah teritorial China. China menduduki kepulauan Paracel pada tahun 1976, dan pada tahun 1992 China kembali mempertegas klaim tersebut. Pada 7 Mei 2009, pemerintah China mendaftarkan klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan kepada PBB. Hal ini mendapat pertentangan dari Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam.

Menurut China, pulau-pulau dan wilayah Laut China Selatan ditemukan oleh pendahulu China yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi. Lalu pada abad 12 sebelum

Masehi oleh Dinasti Yuan pulau-pulau dan wilayah laut di Laut China Selatan dimasukkan kedalam peta teritori China yang kemudian diperkuat dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum Masehi. Dengan berpedoman pada latar belakang sejarah China Kuno tentang peta wilayah kedaulatannya, China kemudian beranggapan bahwa Laut China Selatan merupakan wilayah kedaulatannya. Pada awal ke-19 dan abad ke 20 China mengemukakan bahwa kepulauan Spratly yang jaraknya kurang lebih 1.100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utara kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8 km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari provinsi Hainan(Suhama, 2012).

Beberapa penelitian mengatakan bahwa kebutuhan China akan minyak bumi semakin besar, sedangkan jumlah produksi minyak buminya sendiri semakin menurun. Maka dari itu, kawasan Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang sangat penting bagi China . Itulah alasan mengapa China semakin menguatkan tuntutan terhadap Kepulauan Spratly yang diperkirakan mengandung sumber minyak yang sangat berlimpah.Bagi China , perairan Laut China Selatan sangat penting sebagai jalur perdagangan dengan negara-negara ASEAN dan Asia timur lainnya, juga Amerika Serikat dan sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara Guang Zho, Hongkong, Manila, dan Singapura.

Selain didasari oleh kepentingan ekonomi, klaim China atas kepemilikan kawasan Laut China Selatan juga disertai kepentingan politik serta kemajuan akan pertahanan keamanan negaranya. Kepentingan politik China di Laut China Selatan dapat dilihat dalam dua konteks. Yang pertama, konteks strateginya di kawasan Asia Tenggara dan yang kedua adalah dalam konteks Laut China Selatan. Dalam kaitannya dengan strategi politik luar negeri China di Asia Tenggara, Laut China Selatan kerap dianggap sebagai bagian dari wilayah dimana China diduga berniat untuk membuktikan dan memproyeksikan peranan strategisnya. Dalam hal ini, besar

dugaan bahwa salah satu tujuan utama China di Asia Tenggara adalah menegaskan kembali arti penting dan peranan Beijing sebagai sebuah negara besar, yang memiliki angkatan bersenjata dengan kemampuan memproyeksikan kapabilitas angkatan laut ke laut lepas.(Asnani Usman, 1997)

Dilihat dari kepentingan keamanan, Laut China Selatan adalah wilayah perairan yang sangat penting bagi China . Pertama, China mulai sadar akan kelemahannya di masa lalu yang tidak fokus akan keamanan laut. Hal ini yang memudahkan imperialisme Barat yang kemudian mengakibatkan wilayah China terbagi-bagi dalam penguasaan kekuatan asing.China mempelajari banyak hal tentang arti penting penguasaan jalur laut di sekitar pantai bagi keamanan nasional negaranya.Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa upaya penguasaan kawasan Laut China Selatan adalah bentuk dari upaya China untuk mengimbangi kekuatan AS di kawasan ini.China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam.

Kedua, berkaitan dengan kebutuhan China akan angkatan armada laut maka klaim China atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan ini akan menjadi sangat penting. Dengan niatnya untuk memperoleh status sebagai kekuatan maritim yang handal bukan hanya ditingkat regional Asia Timur dan Asia Tenggara, tapi juga internasional. Sebagai salah satu sasaran program modernisasi, China berusaha mengembangkan kemampuan Angkatan laut guna meningkatkan statusnya dari negara dengan “*kekuatan pantai*” menjadi negara yang memiliki “*kekuatan laut biru*” (*blue water navy*).Suatu kekuatan yang memiliki kemampuan proyeksi jauh ke wilayah samudra luas.Artinya kekuatan laut biru dapat dijadikan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin dipertimbangkan di arena internasional.

## 2. Vietnam

Vietnam mengatakan bahwamereka telah menguasai kepulauan Paracels dan Spratly sejak abad ke-17. Vietnam juga mengatakan bahwa Beijing tidak pernah memiliki kedaulatan kepulauan Paracels dan Spratly. Tuntutan klaim Vietnam atas kepemilikan kepulauan Spratly juga didasarkan pada latar belakang sejarah.

Klaim Vietnam atas pulau-pulau Spratly juga berdasarkan perolehan Kaisar Gia Long tahun1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam tahun 1832. Kaisar Minh Mang yang memerintah kerajaan Vietnam pada tahun 1834 juga telah mendirikan pagoda dan tanda batu (*stone tablet*) di Pulau Spratly.(Asnani Usman, 1997, p. 6)

Selain itu pada tahun 1930, kepulauan Spratly dan Paracel ada dibawah kontrol Perancis yang pada saat itu masih menjajah Vietnam.Dan pada saat Vietnam telah merdeka dari Perancis, negara ini mengklaim bahwa kepulauan Spratly adalah daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa.

Dari sudut sejarah, tuntutan Vietnam lebih lemah daripada China karena negara ini mengalami kesulitan untuk membuktikan kesinambungan penguasaan mereka atas negara dan wilayah sejak tahun 211 SM akibat penjajahn China yang kemudian disambung dengan penjajahan Perancis setelah sempat merdeka dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tetapi Vietnam mengemukakan bahwa dokumen yangmenunjukkan pemilikan Vietnam atas pulau-pulau Spratly telahdimusnahkan oleh China pada saat negara ini menjajah Vietnam.(Asnani Usman, 1997, pp. 6-7)

Setelah Perang Dunia II, Vietnam mengemukakan dasar tuntutanyadengan menunjuk pada Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951.Vietnam yang pada waktu itu hadir dan menandatangani perjanjian initelah menegaskan tuntutannya atas Kepulauan Spratly seperti yangdinyatakan oleh PM Republik Vietnam, Tran Van Huu bahwa "... *kami*

*menegaskan hak kami atas Kepulauan Spratly dan Paracel, yang selalu menjadi milik Vietnam". Pada tahun 1956, Vietnam memasukan Kepulauan Spratly kedalam Provinsi Phuoc Tuy, dengan suatu dekrit tertanggal 22 Oktober 1956. (Asnani Usman, 1997, p. 7)*

Kawasan Laut China Selatan memiliki arti penting bagi Vietnam. Vietnam ingin mengembalikan lagi perekonomiannegaranya yang sempat hancur karena Perang berlarut-larut selama kurang lebih 30 tahun dan invasi Vietnam terhadap Kamboja pada tahun 1978 yang membuat Vietnam terkena embargo ekonomi terutama oleh Amerika Serikat dan Jepang.

Ketika konflik Vietnam dan Kamboja belum berakhir, negara ini menggantungkan kepentingan ekonominya kepada Uni Soviet sehingga kawasan Laut China Selatan tidak menjadi hal yang begitu penting bagi Vietnam. Namun pada tahun 1991, ketika penyelesaian konflik Kamboja tercapai, Vietnam mulai mendorong kerja sama ekonominya dengan negara-negara ASEAN.

Hubungan kerja sama ekonomi yang baru inilah yang membuat Laut China Selatan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi bagi Vietnam. Perdagangan antara Vietnam dengan Amerika Serikat, negara-negara Asia timur, dan negara-negara lainnya terus meningkat secara signifikan. tentu saja aktivitas perdagangan ini dilakukan dengan melewati jalur pelayaran Laut China Selatan. dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan Vietnam inilah yang membuat jalur pelayaran Laut China Selatan kemudian memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi Vietnam.

Kepentingan politik Vietnam yang paling utama dalam konflik laut China selatan adalah memelihara serta mempertahankan kemerdekaan dan integritas wilayah yang dimilikinya. Menurut Vietnam, pendudukannya atas Kepulauan

Spratly yang diklaim sebagai wilayah teritorialnya menjadi sangat penting. Hampir seluruh aktivitas perdagangan dan ekonomi Vietnam yang akan terus menunjang keberlangsungan hidup negara mereka terjadi di kawasan ini. Selain itu, kekhawatiran Vietnam akan ancaman China membuat Vietnam harus terus mempertahankan kepentingannya dikawasan tersebut.

### **3. Filipina**

Pada tahun 1955 Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling kepulauan Filipina, tetapi tidak menyebutkan negara kalayaan. Filipina mengklaim beberapa pulau di sekitar kepulauan Spratly berdasarkan temuan (discovery) dari Thomas Cloma, direktur maritime Filipina. Saat itu, kepulauan itu disebut sebagai *terra nullius* atau wilayah yang tak dimiliki oleh siapapun. Pada tahun 1947 Tomas Cloma mengklaim kepemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, Pulau Pasir, gugus karang, dan daerah perikanan di kepulauan Spratly seluas kurang lebih 649.776 mil persegi. Pada bulan Mei 1956, ia memproklamasikannya sebagai negara baru yang dinamakan Kalayaan atau Freedom Land, serta menyatakan diri sebagai ketua Dewan Tertinggi Negara Kalayaan.

Pada tahun 1974, kepemilikan Kalayan diserahkan kepada Republic Filipina. Pada tanggal 11 juni 1979, Marcos, presiden Filipina saat itu menetapkan kalayan sebagai bagian dari wilayah Filipina dan merupakan daerah yang khusus dan terpisah dari provinsi Palawan.

Untuk memperkuat klaimnya, Filipina menduduki delapan pulau kecil di kepulauan Spratly sejak tahun 1978, yaitu di Pulau Nashan (Lawak), Pulau Flat (Patag) Pulau Thitu (Pagasa), Pulau Loaita (Kota), Northeast Cay (Paraola), Pulau Weat York (Likas), Lankiam Cay (Panata) , dan Commodore reef.

Selain merujuk pada kenyataan bahwa Jepang sudah melepaskan haknya terhadap kepulauan Spratly dan tidak menyatakan diserahkan ke negara manapun, alasan klaim Filipina juga Merujuk kepada Perjanjian Perdamaian San Francisco, bahwakawasan tersebut merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun.

Tahun 2012, sebuah kapal nelayan Cina beroperasi di sekitar gugusan karang Scar Borough, salah satu gugusan karang di kepulauan Spratly. Kontan saja angkatan laut Filipina berusaha menangkap kapal nelayan tersebut, namun penangkapan digagalkan oleh kapal pengintai Cina yang berada di perairan Spratly(Wirasuta, 2013, pp. 85-86).

Kepentingan Filipina atas kepemilikan kawasan Laut China Selatan juga merupakan kepentingan ekonomi atas sumber minyak yang ada di kawasan lepas pantai dikawasan ini. Sebagai negara yang memliliki ketergantungan impor minyak sampai dengan 95%, dengan penemuan sumber minyak bumi baru dikawasan lepas pantai Palawan, kebutuhan impor minyak bumi Filipina akan berkurang.

Selain atas dasar kandungan minyak bumi yang sangat berlimpah di kawasan kepulauan Spratly, Filipina juga memerlukan kawasan ini sebagai jalur perdagangannya dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara besar lainnya.

Penguasaan terhadap kepulauan Spratly (kepulauan kalayan) di kawasan Laut China Selatan merupakan hal yang sangat penting bagi kepentingan keamanan Filipina. Hal ini berkaitan dengan apa yang pernah terjadi pada masa perang dunia kedua. Saat itu Jepang menggunakan kawasan kepulauan Spratly ini sebagai pangkalan untuk menyerang Filipina. Kepentingan keamanan inilah yang menjadi alasan mengapa Filipina tidak akan menyerahkan kepemilikannya atas kepulauan Spratly keada negara lain.

#### 4. Malaysia

Keterlibatan Malaysia dalam konflik di kawasan LCS dimulai pasca penerbitan *Peta Baru Menunjukkan Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia* (selanjutnya disingkat: Peta Baru) pada tanggal 21 Desember 1979 dan secara resmi mengklaim perluasan ZEE pada tanggal 25 April 1980 (Maksum, 2017, p. 11). Malaysia menganggap bahwa Terumbu layang-layang (Swallow Reef), Matanani (Mariveles Reef), dan Ubi (Dallas Reef) berada di dalam landas kontinen dan ZEE-nya. Itu berarti bahwa Malaysia menganggap pulau-pulau itu sebagai wilayah kedaulatannya. Termasuk juga Louisa Reef yang juga diklaim oleh Brunei Darussalam. Dalam klaimnya, Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut dan menyatakannya sebagai bagian dari Sabah dan Serawak pada abad ke-18.

Menurut sumber lain, ada pulau-pulau dan gugusan karang-karang lainnya di sekitaran kepulauan Spratly yang juga tercantum di dalam peta yang dikemukakan Malaysia saat itu. Diantaranya adalah Commodore Reef, Amboyna Cat, Southwest Shoal, Ardasier Breakers, Gloubcester Breakers, Canada Reef, Lizzie Weber Reef, Northeast Shoal, Glasgow Shoal dan North Viper Shoal. (Asnani Usman, 1997, p. 6)

Sebagai negara pantai, Malaysia menganggap bahwa kawasan perairan Laut China Selatan adalah kawasan yang sangat penting dalam menunjang kepentingan perekonomiannya. Seperti negara-negara Asean pada umumnya, Malaysia juga banyak melakukan perdagangan luar negeri dengan banyak negara. Khususnya, Filipina, Jepang, China, Brunei Darussalam, Taiwan, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Dari segi kepentingan keamanan, Kondisi geografis Laut China Selatan yang memisahkan Malaysia Barat dan Timur menjadikan perairan ini penting bagi Malaysia. bukan hal yang mengherankan jika Malaysia merasa khawatir apabila kawasan ini akan digunakan untuk mengancam integritas wilayahnya.

Kekhawatiran Malaysia diperkuat dengan adanya peningkatan aktivitas angkatan laut China di kawasan ini. Adanya peningkatan aktivitas angkatan laut China inilah yang menyebabkan Malaysia beranggapan bahwa China adalah ancaman jangka panjang bagi negaranya.

Dibangunnya pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Labuan (Sarawak) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Malaysia di Laut China Selatan. Untuk maksud yang sama, Malaysia juga telah merencanakan akan membangun pangkalan Angkatan Laut di Sandakan (Sabah). (Asnani Usman, 1997, p. 38)

## **5. Brunei Darussalam**

Pasca memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1985, Brunei Darussalam secara tidak langsung bersengketa dengan Vietnam sebagai akibat dari meluasnya garis landasan kontinen warisan penjajah. Akibatnya, Brunei merasa berhak atas status kawasan Louisa Reef yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly. (Maksum, 2017). Bagian dari wilayah yang sama juga diklaim oleh Malaysia, Cina, Taiwan dan Vietnam dan itu termasuk Kastil Bombay, Louisa Reef dan Owen Shoal (Ward, 2017).

Bagi Brunei Darussalam, perairan Laut China Selatan penting bagi perdagangan luar negerinya dengan Filipina, dan negara-negara besar lainnya. Ekspor Brunei Darussalam ke Filipina mencapai US\$33 juta, dan impornya dari Filipina meliputi US\$4 juta. Sementara itu ekspor Brunei Darussalam ke Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat mencapai US\$1.178 juta, sedangkan impor Brunei Darussalam dari Jepang, Taiwan, dan China dan Amerika Serikat meliputi US\$598 juta. (Asnani Usman, 1997, p. 29)

### C. Posisi Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan

Dalam perhitungan Indonesia mengenai peta dan *nine dash line* yang dibuat oleh China, maka klaim China akan menjorok ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta landas kontinen seperti yang sudah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Dalam perspektif hukum laut internasional, apa yang dilakukan oleh China terhadap klaimnya di Laut China Selatan dan ZEE Indonesia itu merupakan suatu pelanggaran, Berdasarkan kepada acuan prinsip negara kepulauan dan sesuai UNCLOS 1982. Ini berarti bahwa Indonesia terancam akan dirugikan dengan aksi China karena wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna, provinsi Kepulauan Riau akan masuk dalam wilayah klaim China tersebut.

Jika dilihat sekilas, kawasan perairan kepulauan Natuna yang kaya gas itu masuk dalam wilayah Laut China Selatan yang oleh China diklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, klaim China atas ZEE Indonesia di Natuna tersebut melanggar ZEE Indonesia karena secara jelas Laut Natuna masuk ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Sejak tahun 1990, Indonesia selalu memosisikan diri sebagai negara yang tidak ikut mengklaim *non claimants state* dalam konflik Laut China Selatan. Ada beberapa alasan yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang tidak terlibat dalam konflik wilayah yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. Yang *pertama* adalah Indonesia telah berpendapat bahwa berdasarkan hukum internasional, klaim apa pun atas hak-hak kelautan seperti perairan teritorial, ZEE, atau hak penangkapan ikan tidak dapat disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan. Dan karena tidak ada persengketaan antara Tiongkok dan Indonesia mengenai kedaulatan atas daratan, sikap yang paling baik adalah mengabaikan adanya garis tersebut (Saragih, 2018). Telah ada sebuah konsensus di Jakarta bahwa memperkarakan garis tersebut akan

memberikan pengesahan yang sebenarnya tidak layak didapatkan.

Indonesia memperoleh manfaat utama dari keengganannya mengakui garis putus-putus itu. Sikap ini memungkinkan Indonesia untuk memperlakukan ketidaksepakatan apa pun yang muncul akibat tindakan Tiongkok di wilayah-wilayah yang tumpang tindih itu sebagai hal yang tidak berhubungan dengan sengketa-sengketa negara-negara lain di kawasan itu akibat garis putus-putus pihak Beijing. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak ikut menggugat dalam persengketaan-persengketaan Laut Cina Selatan yang lebih luas (Connelly, 2017). Penekanan terhadap posisi netral ini datang sesudah Cina menyatakan *tak keberatan* terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Natuna. Namun Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamirzad Ryacudu mengatakan tak aman untuk mengabaikan kemungkinan ancaman di masa depan, sekalipun situasi tampaknya meningkat dalam beberapa bulan terakhir (Saragih, 2018).

Yang *kedua* adalah, karena sikap Indonesia yang enggan untuk mengakui klaim yang disampaikan oleh China, maka Indonesia dapat berperan sebagai "*honest broker*" atau "*perantara yang tidak memihak*" dalam negosiasi mengenai upaya penyelesaian sengketa-sengketa kawasan tersebut. Contohnya dengan menjadi tuan rumah "*lokakarya-lokakarya*" informal tentang isu-isu tersebut dari tahun 1990 hingga 2014. Posisi sebagai penengah yang jujur dapat dipertahankan sepanjang konflik di LCS berkaitan dengan kepulauan, termasuk karang dan bebatuan lainnya, serta keamanan dan jaminan kebebasan pelayaran internasional. Keengganannya untuk menantang adanya garis putus-putus ini juga memungkinkan Indonesia menghindari perbincangan-perbincangan sulit dengan Tiongkok mengenai permasalahan ini. Bagi Tiongkok, dihindarinya pernyataan secara terbuka karena sengketa batas maritim dengan Indonesia akan merugikan posisinya di Laut Cina Selatan.